

**PERDAGANGAN PAKAIAN *SECOND BRANDED* DARI SINGAPURA KE
BATAM DALAM KERANGKA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN
TAHUN 2015-2016**

Oleh: Nurul Suwandoko

Email: doko_nurul@gmail.com

Pembimbing Afrizal S.IP MA

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Riau

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru, 28293

Abstract

This research describe the second branded clothes bussiness from Singapore to Indonesia in Asean Economic Community in 2015-2016. Regionalism are one of agreement between states to create a marekt brief in regions. Asean Economic community was held since 2015 to anticipation the trade from China and India and it's make a common market in South East Asia Regions.

The research method used was a qualitative with descriptive as a technic of the research. Writer collects data from books, encyclopedia, journal, mass media and websites to analyze the policy of Government of Indonesia implemented export constant price for cocoa product from Indonesia to China. The theories applied in this research are neo liberalism with globalization concept.

The result shows that the second branded clothes bussiness from Singapore to Indonesia in Asean Economic Community in 2015-2016 are was increase and it's make effect teh disadvantage for locall textile production. Dsince 2015 the second branded from Singapore was enterance in Batam Island by illegal harbour and the Indonesia government by Custom instituitons was checking the second branded from Singapore.

Key words: *bussiness, second branded and MEA.*

PENDAHULUAN

Penelitian ini merupakan sebuah kajian ekonomi politik internasional yang menganalisis mengenai impor pakaian bekas dari Singapura ke Batam dalam kerangka Masyarakat Ekonomi Asean tahun 2015-2016. Selain itu juga akan dibahas mengenai dampak dari kesepakatan masyarakat Ekonomi Asean terhadap dinamika perdagangan pakaian bekas dari Singapura ke Indonesia khususnya ke Pulau Batam yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.

Era globalisasi telah menyebabkan berbagai perubahan yang fundamental dalam tatanan perekonomian dunia baik sektor keuangan maupun perdagangan. Begitu pula sama halnya yang terjadi pada bidang perdagangan, pada awal mula berkembangnya perdagangan yang dilakukan negara-negara awalnya hanya bersifat sederhana dan lebih sering berlangsung secara bilateral ataupun regional yang didasarkan pada kedekatan geografis.

Namun, seiring perkembangan teknologi dan informasi, hubungan perdagangan antar negara yang semakin kompleks dapat dilihat misalnya dengan kelangsungan suatu transaksi yang berlangsung cepat, terjadinya persaingan dagang yang

ketat baik perdagangan barang maupun jasa. Pada gilirannya akan menumbuhkan kesadaran bersama antar pelaku dalam perdagangan internasional, bahwa semakin diperlukannya dan dibutuhkannya suatu perdagangan bebas untuk dilakukan. Perdagangan bebas yang dimaksud adalah yang berlangsung dengan fair, tanpa dibatasi dan atau diintervensi dengan pengenaan tarif, kuota, subsidi, kontrol nilai tukar, dan lain-lain yang bersifat proteksi dan dapat menghambat arus dan keberlangsungan perdagangan tersebut.

Oleh karena itu, perdagangan bebas memiliki banyak tujuan, diantaranya yaitu untuk meningkatkan kemakmuran bagi negara-negara yang terlibat, serta memiliki harapan dapat menciptakan suatu tatanan perekonomian yang stabil dan saling menguntungkan serta untuk menarik para investor agar menanamkan investasi dalam negeri serta meningkatkan perdagangan diantara negara-negara dunia. Atas dasar tujuan tersebut menyebabkan banyak negara-negara dunia bergabung dalam kesepakatan-kesepakatan perdagangan bebas yang terbentuk.

Menghadapi fenomena perdagangan internasional di kawasan Asia Tenggara ini, maka Pemerintah Indonesia sejak tahun 1999 telah

menetapkan beberapa wilayah di Indonesia sebagai wilayah perdagangan bebas dan salah satunya adalah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau. Secara konseptual, kawasan ekonomi khusus merupakan bukti perdagangan antara Indonesia dan Singapura yang menyangkut penggunaan pulau Batam, pulau Karimun, dan pulau Bintan dibawah kerjasama kedua negara dalam mengembangkan perekonomian.

Wilayah ini memiliki kebijaksanaan khusus yang diharapkan mampu menarik investor baik asing maupun lokal. Kebijakan khusus tersebut meliputi kebijakan di bidang keuangan, perpajakan, imigrasi, pelayanan perijinan satu atap dan peraturan perburuhan. Sejarah lahirnya kawasan ekonomi khusus berawal dari perkembangan Zona Bebas yang dapat dilihat hingga sebelum masa kekaisaran Romawi, sekitar 2500 tahun yang lampau.¹

Pada pertengahan milenium terakhir sebelum tarikh masehi, di wilayah yang saat ini disebut Yunani, berlaku sistem kenegaraan yang memberi peluang bagi kota-kota untuk membentuk pemerintahan mandiri. Saat itu, negara kota adalah fenomena

yang lazim, seperti Athena atau sparta yang terkenal itu. Pada suatu masa, wilayah tersebut dikuasai pemerintahan Romawi, yang dikenal dengan konsep Pax Romana, sistem kesatuan dalam kekaisaran Romawi yang memberi jaminan keamanan di wilayah kekuasaannya. Sistem ini juga memberi peluang bagi tiap kota atau kawasan yang dikuasai untuk tetap mempertahankan tradisi dan terutama dalam kebebasan perdagangan.

Secara umum, kawasan ekonomi khusus adalah suatu kawasan geografis yang memiliki aturan atau perundang-undangan ekonomi khusus dan berbeda dari aturan atau perundang-undangan ekonomi konvensional yang berlaku umum. Tujuan pembentukan kawasan ekonomi khusus terutama adalah untuk mendorong peningkatan investasi, khususnya investasi asing.

Provinsi Kepulauan Riau merupakan wilayah yang memiliki kekhususan secara geografis karena berbatasan dengan negara tetangga sehingga merupakan pintu masuk lintas batas antara Indonesia, Singapura, Malaysia dan Vietnam yang memiliki luas wilayah 252.602 Km² dengan luas perairan 242.497 Km² (96%). Provinsi Kepri yang wilayahnya didominasi dengan perairan merupakan daerah lintas kepulauan yang menjadi lintasan

¹One Stop Service in Sumatra Promotion Centre (SPC) Karimun, Kepulauan Riau Province, 2007, <http://bpidkep.riau.go.id/index.php?bahasa=english&bpid=halutama&link=pelayanan>. Diakses

strategis jalur perekonomian, perdagangan, pariwisata, industri dan investasi.²

Oleh karena itu letak yang strategis Provinsi Kepulauan Riau terutama Kota Batam menjadikan Pulau Batam sebagai landasan dan pasar potensial dalam perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara salah satu bentuk perdagangan bebas adalah mengenai perdagangan pakaian baik baru ataupun pakaian bekas. Perdagangan pakaian bekas telah berkembang sangat baik dalam lingkup global sejak tahun 1990. Hampir semua negara yang terlibat di dalam perdagangan pakaian bekas, baik sebagai eksportir ataupun importir.³ Amerika tercatat sebagai negara eksportir pakaian bekas terbesar di dunia, misalnya 385.000 ton diekspor pada tahun 2003 hampir 40 % dari pasar. Eksportir besar lainnya termasuk Jerman, Britania Raya, Belanda dan Jepang. Sedangkan Negara-negara sasarannya adalah negara dunia ketiga (Zimbabwe, Ghana, Rwanda, Tunisia, Kenya, Zambia, Asia Selatan dan Asia

² Kadin-Indonesia. "Waspada Daya Saing Nasional". Hal.21-22. Diakses dari www.kadin-indonesia.or.id. pada tanggal 01 Maret pukul 17.18 WIB

³ Sally Baden and Catherine Barber, *The impact of the secondhand clothing trade of developing countries*, September 2005.

Tenggara, termasuk di negara kita Indonesia).⁴

Impor pakaian bekas ini sangat bermanfaat bagi konsumen miskin, terutama di negara-negara yang rendah daya beli. Sebagai contoh, di Afrika hampir semua kelompok sosial-ekonomi memilih untuk membeli pakaian bekas (*secondhand clothing*). Kenaikan penyelundupan pakaian bekas dipengaruhi oleh penurunan industri dalam negeri. Penurunan produksi tekstil juga tampak jelas di Nigeria, masyarakatnya lebih memilih untuk membeli pakaian bekas dengan harga yang relatif murah.

Dalam beberapa kasus di dunia internasional terdapat banyak penipuan dalam kegiatan impor pakaian bekas yakni dengan memanipulasi yang menyatakan bahwa barang yang dikirim adalah pakaian baru. Hal ini sangat berpengaruh dan dapat menghambat perkembangan perekonomian suatu negara. Pakaian bekas tidak diterima di banyak negara terutama di kawasan ASEAN. ASEAN tidak mengizinkan masuknya pakaian bekas ke negara masing-masing dan melarang beredarnya pakaian bekas di dalam negerinya. Indonesia yang merupakan bagian dari ASEAN juga

⁴ <http://thenationonlineng.net/web3/saturday-magazine/special-report/7765.html>, diakses pada tanggal 25 agustus 2010.

melakukan pelarangan terhadap masuknya pakaian bekas yang dapat merugikan perekonomian negara.⁵

Selama ini, negara Singapura, Taiwan, Malaysia, China, Hongkong, Korea dan Jepang ditenggarai sebagai negara penyuplai pakaian bekas ke Indonesia. Pakaian bekas impor mulai marak masuk Indonesia sekitar tahun 2000 yang diselundupkan melalui pelabuhan-pelabuhan tradisional. Bahkan Janto Dearmando Saragih Ketua Asosiasi Pedagang Pakaian Bekas Impor menuturkan, bisnis baju bekas impor sudah berlangsung sejak 1976.⁶

Pada tahun 2001, nilai resmi impor pakaian jadi menurut Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) adalah 17 juta dolar AS, dan angka ini meningkat menjadi 53 juta dolar AS di tahun 2005. Jumlah pakaian bekas impor yang masuk diperkirakan mencapai 40.000 bal perbulan pada tahun 2005. Jumlah itu lebih meningkat jika dibandingkan pada saat pemerintah aktif melakukan operasi pembakaran dan penangkapan pakaian bekas impor

di tahun 2003.⁷ Padahal salah satu penentu keunggulan daya saing suatu komoditi adalah kondisi permintaan di pasar domestik.

Maraknya impor pakaian bekas dipengaruhi oleh faktor, antara lain: luasnya kepulauan nusantara dan begitu banyaknya pintu masuk dan keluar yang harus diamankan, kemampuan dan kemauan aparaturnya penegak hukum, serta rendahnya partisipasi warga masyarakat dalam bekerja sama dalam dengan aparaturnya pemerintah. Sehingga hal ini juga menjadi faktor terjadinya peningkatan dalam perdagangan pakaian bekas antara Singapura dan Indonesia terutama dalam era masyarakat ekonomi Asean.

Kerangka dasar pemikiran diperlukan oleh penulis untuk membantu dalam menetapkan tujuan dan arah sebuah penelitian serta memiliki konsep yang tepat untuk pembentukan hipotesa. Teori bukan merupakan pengetahuan yang sudah pasti tapi merupakan petunjuk membuat sebuah hipotesis. Dalam melakukan penelitian ini, dibutuhkan adanya kerangka pemikiran yang menjadi pedoman peneliti dalam menemukan, menggambarkan dan

⁵ <http://www.hupelita.com/baca.php?id=12028>, diakses pada tanggal 04 Oktober 2010.

⁶ http://www.republika.com.Awal_mula_perdagangan_pakaian_bekas.htm, diakses pada tanggal 9 mei 2011

⁷Prahara, G, Analisis Daya Saing Komparatif dan Kompetitif Pakaian Jadi Indonesia Tahun 2000-2006.

[Skripsi]. IPB, Bogor.

menjelaskan objek penelitian sekaligus menjadi *frame* bagi peneliti.

Hubungan Internasional merupakan studi tentang interaksi antara beberapa aktor yang berpartisipasi dalam politik internasional yang meliputi negara-negara, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, kesatuan sub-nasional seperti birokrasi dan pemerintah domestik serta individu-individu. Tujuan dasar studi Hubungan Internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku para aktor negara maupun non negara, di dalam arena transaksi internasional. Perilaku ini bisa berwujud kerjasama, pembentukan aliansi, perang, konflik serta interaksi dalam organisasi internasional.⁸

Penulis menggunakan perspektif neo liberalisme, dimana dalam perspektif ini yang menjadi tujuan utama dari hubungan perdagangan adalah efisiensi untuk mendapatkan keuntungan dari setiap transaksi dan interaksi ekonomi yang dijalankan. Perspektif ini bermanfaat untuk memahami fenomena disetiap negara atau pemerintah yang berusaha untuk meningkatkan daya saing nasional dan kekuatan ekonominya untuk mendapatkan keuntungan yang

⁸ Jemadu, Aleksius. 2007. *Politik Global dalam Teori dan Praktik*. Jakarta. Graha Ilmu

ditawarkan oleh pasar internasional atau global.⁹

Perspektif neo liberalisme tidak hanya fokus pada negara sebagai aktor internasional, tetapi terdapat aktor non negara seperti individu, kelompok dan organisasi internasional yang mempengaruhi hubungan internasional saat ini. Analisis yang penulis gunakan adalah, aktor non negara, seperti individu dan kelompok. Hal ini karena hubungan internasional pada dasarnya tidak hanya di dominasi oleh perilaku Negara-Bangsa. Dalam hal ini, perilaku individu, kelompok, organisasi, lembaga dan proses perpolitikan merupakan salah satu fokus mengenai perilaku mereka itu berkaitan dengan internasional negara yang bersangkutan.

Menurut Mohtar Mas'ood secara umum ekonomi internasional adalah studi mengenai saling berhubungannya antara ekonomi dan politik dalam era internasional. Dalam definisi yang khusus, fokus perhatian ekonomi politik adalah hubungan antara dinamika pasar dengan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan pasar ditingkat domestik maupun internasional.¹⁰

⁹ Aleksius jemadu. 2007. *Politik Global dalam Teori dan Praktik*. Jakarta. Graha Ilmu.

¹⁰ Mohtar Mas'ood, *Ekonomi Politik Internasional*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1990.

Ekonomi internasional merupakan hubungan ekonomi antarnegara di dunia. Hubungan tersebut menimbulkan saling ketergantungan (*interdependence*) antara negara satu dengan negara lainnya dan merupakan esensi yang penting untuk peningkatan kesejahteraan hidup hampir semua negara di dunia, selain itu hubungan ini tidak hanya identik dengan hubungan ekonomi internasional antarnegara namun sebagian besar berhubungan dengan perdagangan internasional. Bidang ekonomi internasional seperti pertukaran jasa, komoditi, modal, teknologi informasi dan komunikasi.

Pertukaran jasa dan komoditi terjadi antara penduduk di satu negara dengan penduduk di negara lain karena adanya keperluan untuk memperoleh jasa dan komoditi atau barang guna memenuhi kebutuhan hidup yang tidak selalu dapat dihasilkan sendiri. Pertukaran teknologi dan modal terjadi dalam rangka membantu menggali dan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang dimilikinya untuk pengembangan industrinya. Teknologi yang dimiliki oleh suatu negara belum cukup canggih untuk mendukung pelaksanaan pembangunan ekonomi dan modal yang dimiliki suatu negara tidak memadai.

Globalisasi adalah suatu proses yang multi-dimensi, meliputi ekonomi, politik, sosial, budaya dan ideologi.¹¹ Di era globalisasi beragam produk global dapat dengan mudah diperoleh di pasar sehingga konsumen benar-benar dimanjakan. M. Waters mendefinisikan konsep globalisasi sebagai sebuah proses sosial dimana halangan – halangan yang bersifat geografis pada tatanan sosial dan budaya semakin menyusut dan setiap orang semakin sadar bahwa mereka semakin dekat satu sama lain.

Selain itu Robert W Cox menjelaskan Karakteristik globalisasi adalah kecenderungan menyatunya produksi dan pembagian kerja secara internasional, perpindahan penduduk dari selatan ke utara, lingkungan kompetisi baru yang mempercepat poses itu, dan internasionalisasi negara membuat negara sebagai agen globalisasi baru.¹² Proses globalisasi secara utuh akan membuat dunia seragam dan proses globalisasi akan menghapus identitas dan jati diri. Kebudayaan lokal atau etnis akan

¹¹ M. Waters, *Globalisation* (London : Routledge, 1995), James H. Mittelman (peny.), *Globalization : Critical Reflections* (Boulder : Lynne Rienner, 1996).

¹² RW. Cox. *Social Forces, States and World Orders: Beyond International Relations Theory*, Millenium, Vol 10 No 2.1981.

ditelan oleh kekuatan budaya besar atau kekuatan budaya global.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN ini dilatarbelakangi oleh persiapan menghadapi globalisasi ekonomi dan perdagangan melalui ASEAN Free Trade Area (AFTA) serta menghadapi persaingan global terutama dari China dan India. Percepatan keputusan negara ASEAN untuk membentuk MEA yang pada awalnya akan dimulai pada tahun 2020 menjadi 2015 menggambarkan tekad ASEAN untuk segera meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing antar sesama negara anggota ASEAN untuk menghadapi persaingan global.

MEA adalah bentuk integrasi ekonomi ASEAN dalam artian adanya sistem perdagangan bebas antara Negara-negara ASEAN. Definisi integrasi ekonomi ASEAN secara umum adalah pencabutan atau penghapusan hambatan-hambatan ekonomi (*economic frontier*) antara perekonomian Negara-negara ASEAN. Hambatan-hambatan ekonomi tersebut meliputi semua pembatasan yang menyebabkan mobilitas barang, jasa, faktor produksi, dan juga aliran

komunikasi, secara aktual maupun potensial.¹³

Secara operasional, integrasi ekonomi ASEAN dapat didefinisikan sebagai pencabutan diskriminasi dan penyatuan politik (kebijakan) seperti norma, peraturan, serta prosedur. Instrumen integrasi ekonomi ASEAN meliputi bea masuk, pajak, mata uang, undang-undang, lembaga, standarisasi, dan kebijaksanaan ekonomi. Tujuan integrasi ekonomi ASEAN adalah untuk meningkatkan volume perdagangan barang dan jasa, meningkatkan mobilitas kapital dan tenaga kerja, meningkatkan produksi, meningkatkan efisiensi produksi serta meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan.

Indonesia dan sembilan negara anggota ASEAN lainnya telah menyetujui perjanjian MEA atau AEC. Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (*Association of Southeast Asia Nations / ASEAN*) didirikan tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand melalui Deklarasi ASEAN oleh Filipina, Indonesia, Singapura dan Thailand (*ASEAN Founding Fathers*). Pada KTT ASEAN ke-9 tahun 2003, ASEAN menyetujui BALI CONCORD II yang memuat 3 (tiga)

¹³ ASEAN Concord II/Bali Concord II, <http://www.aseansec.org/15159.htm>, (diakses tanggal 2 Mei 2015)

pilar untuk mencapai ASEAN Vision2020 yaitu Ekonomi, Sosial Budaya dan Politik Keamanan. Terkait dengan ekonomi, diwujudkan dalam bentuk MEA. Tanggal 20 November 2007 disepakati Piagam ASEAN dan menjadikan ASEAN organisasi berbadan hukum dengan fokus perhatian pada proses integrasi ekonomi menuju MEA.¹⁴ ASEAN Community merupakan wujud dari kerjasama intra-ASEAN dalam Declaration of ASEAN Concord II di Bali, Oktober 2003. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan salah satu pilar dari perwujudan ASEAN Vision 2020, bersama-sama dengan *ASEAN Security Community (ASC)* dan *ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC)*.¹⁵

Suatu komunitas negara-negara ASEAN yang sangat luas, tidak ada batasan-batasan wilayah dalam bidang perekonomian. Dimana suatu negara dapat masuk bebas dalam persaingan pasar. Masyarakat ekonomi ASEAN yang bebas dari berbagai hambatan, pengutamaan peningkatan konektivitas, pemanfaatan berbagai skema kerja sama baik intra-ASEAN maupun antara ASEAN dengan negara mitra

¹⁴ Ibid, Hlm 21

¹⁵ Integrasi Ekonomi ASEAN 2015, <https://www.academia.edu/9503310/>(diakses tanggal 25 Juli 2015)

khususnya mitra FTA, serta penguatan peran pengusaha dalam proses integrasi internal ASEAN maupun dengan negara mitra.

Menurut Rizal dan Aida, bahwa pembentukan MEA dilakukan melalui empat kerangka strategis yaitu pencapain pasar tunggal dan kesatuan basis produksi, kawasan ekonomi yang berdaya saing, pertumbuhan ekonomi yang merata dan terintegrasi dengan perekonomian global. Langkah-langkah integrasi tersebut menjadi strategis mencapai daya saing yang tangguh dan disisi lain akan berkontribusi positif bagi masyarakat ASEAN secara keseluruhan maupun individual negara anggota.

Dalam perkembangannya ASEAN memiliki ruang lingkup kerjasama yang menjadi fokus ASEAN pada hubungan ekonomi dan sosial budaya, sedangkan masalah keamanan terkesan dikesampingkan untuk tetap menjaga keharmonisan di wilayah kawasan Asia Tenggara. Oleh karena itu salah satu bentuk perdagangan antara negara – negara di kawasan Asia Tenggara adalah bentuk perdagangan pakaian bekas antara Indonesia dan Singapura yang masuk melalui Pulau Batam.

Luasnya wilayah nusantara yang terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil, yang diapit oleh dua benua besar,

yaitu benua Asia dan Australia dan yang sangat berdekatan dengan negara-negara tetangga yang sudah mengalami kemajuan terlebih dahulu baik dari bidang perekonomian maupun industri membuka kesempatan ataupun peluang kepada para pengusaha (lokal atau asing) untuk melakukan penyeludupan pakaian bekas. Keadaan ini yang dimanfaatkan oleh para penyeludup disekitar Kepulauan Riau, Aceh (Lhokseumawe, Sabang, Langsa, dll), Sumatera Utara (Belawan, Tanjung Balai Asahan dan Pangkalan Brandan), Sulawesi Utara, Tengah, Tenggara, Timur, Maluku, dan daerah-daerah pantai lainnya.¹⁶

Letak geografis Kepulauan Riau yang berdekatan dengan Singapura merupakan salah satu faktor pendukung lancarnya praktik penyeludupan pakaian bekas. Penyeludupan di daerah ini bisa bersifat tradisional yang dilakukan oleh perseorangan dan kelompok masyarakat pantai, dan bisa juga bersifat professional yang melibatkan sindikat penjahat, baik dari Indonesia sendiri maupun lur negeri.

Selain Kepulauan Riau, terdapat pula jalur-jalur penyeludupan pakaian bekas yang diperkirakan sering terjadi disepanjang pantai yang termasuk dalam perairan Aceh, Sumatera Utara,

Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan lain-lain. Di wilayah Pekanbaru termasuk salah satu yang sering terlihat melakukan kegiatan ilegal ini, yang langsung dikirim dari luar negeri, misalnya dengan jalur: Negara Korea - Singapura dan langsung dikirim ke daerah-daerah seperti Batam, Pekanbaru, Tanjung Balai karimun, Tanjung Balai Asahan, dan daerah lainnya.

Wilayah perbatasan Indonesia dengan Singapura dan Malaysia di Kepulauan Riau (Kepri) masih rawan penyelundupan. Mereka memanfaatkan wilayah perairan yang luas dan dalam sehingga sulit terdeteksi petugas patroli. Modus yang digunakan pun beragam, baik penyeludupan barang ekspor maupun impor.

Ironisnya, pengawasan arus lalu lintas di perbatasan tersebut masih mengalami banyak kendala. Hambatan dari mulai keterbatasan teknologi, standar prosedur pengamanan, hingga rendahnya insentif buat petugas pengawas lapangan. Sejumlah pelaku menggunakan kapal berkecepatan tinggi (speed boat) melebihi kemampuan kapal patroli milik aparat bea cukai.

Di wilayah tugas bea cukai Kepulauan Riau terdapat 13 daerah rawan penyelundupan. Di antaranya perairan Hiu sampai dengan Tanjung

¹⁶ Soufnir Chibro, Op. Cit, Halaman 35.

Kedabu, perairan Tanjung Sempayan sampai dengan Tanjung Parit, perairan Tanjung Parit sampai dengan Tanjung Jering, Perairan Selat Morong sampai dengan Releigh, perairan Releigh sampai dengan Pulau Jefnur, dan laut Cina Natuna.¹⁷

Data Kantor Wilayah Direktorat Jenderal dan Bea Cukai Khusus Kepulauan Riau menyebutkan selama Oktober 2009 hingga Oktober 2010, jumlah kasus penindakan impor ilegal sebanyak 48 kasus. Mayoritas merupakan penyelundupan pa-kaian bekas dari Malaysia. Penyelundupan telepon seluler kebanyakan dari Singapura.

Menurut Komandan Patroli Bea Cukai Kantor Wilayah Khusus Kepulauan Riau, Edi Nurman, upaya pengamanan wilayah perbatasan tidak jarang menghadapi perlawanan dari penyelundup. Mereka biasa menggunakan senjata jenis parang hingga bom molotov. Sedangkan penindakan terhadap ekspor ilegal selama periode yang sama sebanyak 15 kasus. Umumnya berupa kayu dan rokok. Potensi kerugian negara akibat berbagai penyelundupan ini mencapai triliunan rupiah.

Oleh karena itu, agar petugas mampu mengejar para pelaku penyelundupan, saran dia, kemampuan kapal Bea Cukai harus ditingkatkan. Minimal bisa mengimbangi kecepatan sejumlah kapal penyelundup. Pengawasan juga akan lebih efektif bila ditambah dengan radar pantai yang mampu menjangkau seluruh wilayah patroli, dari Aceh hingga Kalimantan.

Secara nasional, impor pakaian bekas akan menimbulkan kekacauan terhadap pola distribusi TPT domestik pada produksi, dan ini artinya, produksi industri TPT nasional akan menurun yang pada gilirannya akan terjadi penurunan pula pada penggunaan mesin-mesin industri. Implikasinya:¹⁸

1. Di bidang sosial, yaitu pengurangan tenaga kerja sesuai dengan proporsi mesin-mesin yang digunakan.
2. Di bidang ekonomi, selain terjadi penurunan pada penerimaan devisa dari ekspor termasuk pajak dan retribusi, juga mempengaruhi penerimaan pada penjualan/pendapatan industri TPT itu sendiri. Namun disisi lain, konsumen golongan ekonomi lemah atau masyarakat yang berpenghasilan rendah

¹⁷ Diakses dari <http://www.bataviase.co.id>. Penyelundupan Pakaian Bekas Marak. Opini Republika. Pada tanggal 15 Maret 2010

¹⁸ <http://egismy.wordpress.com/2005/01/10/kajian-pakaian-bekas/>, diakses pada tanggal 31 Oktober 2010.

memperoleh manfaat, yaitu banyak pilihan dan harga murah.

Dari sudut industri, impor pakaian bekas khususnya akan sangat mengganggu pasar domestik yang merupakan pangsa pasar bagi industri garmen kecil dan konveksi. Dan umumnya akan mengganggu seluruh sektor industri TPT nasional, yaitu industri weaving/knitting; industri spinning; dan industri serat. Penjelasannya sebagai berikut:¹⁹

1. Produk industri garmen kecil dan konveksi nasional pasarnya sebesar 100% adalah domestik, walaupun ada yang ekspor akan tetapi tidak langsung. Disamping itu pula, pangsa pasarnya adalah golongan ekonomi lemah atau masyarakat yang berpenghasilan rendah. Dengan adanya impor pakaian bekas, sudah pasti pasar industri garmen kecil dan konveksi tidak lagi 100% karena harus berbagi dengan produk impor tersebut. Akibatnya, dan ini dapat diprediksikan, bahwa akan ada beberapa industri garmen kecil dan konveksi ini yang tidak beroperasi/tutup/mati.

2. Dengan terganggunya industri garmen kecil dan konveksi ini, dampaknya secara berurutan mengganggu pula industri hulunya. Pertama mempengaruhi industri weaving/knitting yang rata-rata $\pm 65\%$ produknya digunakan oleh industri garmen kecil dan konveksi. Kedua, mengganggu produksi industri spinning sebagai penyuplai industri weaving/knitting yang rata-rata $\pm 50\%$. Ketiga, mempengaruhi produksi industri serat yang menyuplai ke industri spinning yang rata-rata $\pm 75\%$.

Mata pencaharian merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat. Dalam arti kata, dengan adanya mata pencaharianlah orang bias bertahan hidup dan menetap disuatu daerah. Dengan adanya mata pencaharian pula orang bisa meningkatkan taraf hidupnya dan dapat berkembang di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Banyaknya kesempatan kerja disuatu daerah menunjukkan bahwa daerah tersebut mengalami kemajuan dalam bidang ekonomi tentunya. Sebagaimana diketahui bahwa maraknya perdagangan pakaian bekas di pasaran dengan harga yang murah dapat mengancam kelangsungan usaha

¹⁹Ibid.

pedagang skala kecil yang menjual produk baru local secara eceran. Dan berdampak buruk terhadap perekonomian nasional karena mengganggu produktivitas industri tekstil dan produk tekstil (TPT) di dalam negeri yang merupakan usaha padat karya. Sehingga industri TPT dapat mengurangi pengurangan produksi yang akan mengakibatkan terjadinya penurunan pendapatan karyawan dan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Industri tekstil dan garment sangat berperan penting dalam menyerap tenaga kerja. Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) merupakan industry yang tidak bisa diabaikan perannya.²⁰ Oleh sebab itu, dengan adanya impor pakaian bekas asal Singapura ini akan sangat merugikan pabrik-pabrik tekstil dalam negeri yang apabila pabrik-pabrik ini tidak mampu dalam pengembangan atau bahkan berhenti memproduksi karena tidak mampu bersaing dengan produk-produk luar negeri yang masuk dengan lewat jalan illegal atau seludupan, sehingga para pekerja akan mengalami pemutusan hubungan kerja dan pada akhirnya akan menambah angka pengangguran di Indonesia.

²⁰Ibid,

http://www.textile.web.id/article/article_detail.php?art_id=348, diakses pada tanggal 27 Oktober 2010.

Perdagangan pakaian bekas merupakan perdagangan administrasi yang dapat mengakibatkan kerugian dalam penerimaan Negara terutama dari bea masuk. Perdagangan administrasi didasarkan atas *under invoicing* yang dapat menimbulkan mengurangi penggunaan bea masuk atas pemasukan dan pengeluaran barang. Dalam pelaksanaan pembangunan Negara diperlukan biaya yang sangat besar. Biaya yang diperlukan untuk pembangunan diperoleh dari dalam maupun dari luar negeri, yang diantaranya berupa berbagai macam pajak dan bea ekspor dan impor. Hal ini dapat terwujud apabila adanya kerjasama yang baik dan disiplin yang tinggi oleh aparat pemerintah dan warga masyarakat.²¹

Perdagangan pakaian bekas yang meningkat merupakan salah satu penghambat pembangunan. Meningkatnya kegiatan illegal ini kemungkinan karena luasnya wilayah, kemampuan dan kemauan aparat pemerintah dalam memberantasnya serta rendahnya partisipasi warga masyarakat untuk bekerjasama dengan aparat pemerintah guna memberantas permasalahan ini. Usaha yang optimal untuk mempertahankan kondisi, perkembangan dan pertumbuhan serta pemasukan pendapatan Negara dari bea

²¹ H. A. K. Moch. Anwar, Op. Cit, halaman 60.

masuk, pajak-pajak ekspor sangat tergantung pada dedikasi dan kejujuran dibidang ekspor dan impor, demikian juga diperlukan adanya dedikasi yang tinggi dan integritas kepribadian para aparatur Negara dan penegak hukum.²²

Meningkatnya pakaian bekas dapat menghancurkan pertumbuhan ekonomi di dalam masyarakat, karena dengan perdagangan dapat mempengaruhi perkembangan industry-industri dalam negeri dan pada akhirnya akan menghancurkan perekonomian masyarakat dan stabilitas nasional. Selain mengurangi pendapatan Negara, perdagangan pakaian bekas juga dapat mengakibatkan kekacauan perekonomian Negara dan masyarakat. Hal ini terbukti dengan membanjirnya pakaian bekas impor yang mengakibatkan produk-produk dalam negeri tidak dapat bersaing.

Maraknya perdagangan pakaian bekas di pasaran dengan harga yang sangat murah dapat mengancam kelangsungan usaha pedagang skala kecil yang menjual produk baru dan local secara eceran.²³ Kondisi tersebut berdampak sangat buruk terhadap perekonomian nasional karena

mengganggu produktifitas industri tekstil dan produk tekstil (TPT) di dalam negeri yang merupakan perusahaan padat karya. Industri TPT terancam mengalami pengurangan produksi yang dikhawatirkan akan terjadi penuruna pendapatan karyawan karena pengurangan jam kerja atau yang lebih fatal adalah pemutusan hubungan kerja.²⁴ Dengan demikian akan mempengaruhi kepercayaan para investor asing untuk tidak melakukan investasi ke Indonesia. Bahkan, para pemodal yang sudah beroperasi di Indonesia justru lari ke Negara lain yang biaya produksinya lebih kompetitif.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan pada sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa Perkembangan perdagangan impor dari Singapura ke Batam dalam kerangka masyarakat ekonomi Asean adalah semakin meningkat dan mempengaruhi produksi tekstil dalam negeri.”

Beberapa indikator perdagangan impor dari Singapura ke Batam dalam kerangka masyarakat ekonomi Asean adalah pada tahun 2015 negara-negara Asean menyepakati percepatan Masyarakat Ekonomi Asean dengan pergerakan bebas barang; pergerakan

²² Soufnir. Chibro, Op. Cit, halaman 26.

²³ http://www.textile.web.id/article/article_detail.php?art_id=348, diakses pada tanggal 27 Oktober 2010.

²⁴ Ibid.

bebas jasa; pergerakan bebas investasi; pergerakan bebas modal; dan (5) pergerakan bebas pekerja terampil. Tahun 2010-2015 perdagangan impor pakaian bekas semakin meningkat melalui pelabuhan laut di Indonesia serta penetapan Pulau Batam sebagai kawasan perdagangan bebas dan meningkatkan perdagangan lintas batas dengan pengaturan KEK dalam undang-undang No 25 Tahun 2007 merupakan salah satu justifikasi atau legalitas KEK dalam undang-undang No 25 Tahun 2007 atau dalam RUU KEK di masa mendatang.

Gagasan untuk memperjelas KEK di beberapa daerah yang diprediksi potensial menjadi *industrial cluster* sesuai dengan kapasitas kawasan masing-masing, yakni sesuai dengan UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Amanat pembentukan KEK dalam UU sebagaimana disebutkan dalam Pasal 31 ayat (3) UU No 25 Tahun 2007, telah dilakukan pemerintah dengan disiapkannya Naskah Akademis dan Draft RUU tentang Kawasan Ekonomi Khusus. Bahkan dalam Program Legislasi Nasional tahun 2008, RUU KEK merupakan salah satu di antara 31 RUU yang akan menjadi prioritas pembahasan RUU antara Pemerintah dan DPR pada tahun anggaran 2008. Selain itu, masuknya pakaian bekas

dari Singapura ke Indonesia berpengaruh terhadap kerugian yang dialami oleh pengusaha tekstil Indonesia serta lemahnya pengawasan terhadap masuknya impor pakaian bekas dari Singapura ke Indonesia melalui Kota Batam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- F.Kuyama. *The End of History and The Last Man*. London. 1992.
- Jack C. Plano. *Kamus Hubungan internasional*. Jakarta: Putra Abardin, hlm 7
- Jemadu, Aleksius. 2007. *Politik Global dalam Teori dan Praktik*. Jakarta. Graha Ilmu
- Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota. Vol 23/No.3 Desember 2012
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, 2012, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 723
- Keputusan Menteri Perindustrian dan perdagangan No. 229/MPP/Kep/7/1997 Tentang Ketentuan Umum dibidang Impor.
- Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2004), hal.5
- M. Sabir, 1992. *ASEAN Harapan dan Kenyataan*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- M. Waters, *Globalisation* (London : Routledge, 1995), James H. Mittelmann (peny.),

- Globalization : Critical Reflections (Bouder : Lynne Rienner, 1996).
- Merriam Webster's Collegiate Dictionary, ed. 10 (Springfield, Massachusetts, USA : Merriam Webster, Inc.
- Mohtar Mas'ood, Ekonomi Politik Internasional, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1990.
- Prahara, G, Analisis Daya Saing Komparatif dan Kompetitif Pakaian Jadi Indonesia Tahun 2000-2006. [Skripsi]. IPB, Bogor.
- RW. Cox. Social Forces, States and World Orders: Beyond International Relations Theory, Millenium, Vol 10 No 2.1981.
- Sally Baden and Catherine Barber, The impact of the secondhand clothing trade of developing countries, September 2005.
- Sekretariat Nasional ASEAN. 1992. Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, ASEAN Selayang Pandang, Jakarta.
- Syahmin AK, 1988. Masalah-Masalah Aktual Hukum Organisasi Internasional, Bandung : CV ARMICO.
- Undang-undang No.17 Tahun 2006 Tentang perubahan Undang-undang Tahun 1995 Tentang kepabeanan Pasal 1 ayat (1)
- Website**
- ASEAN Economic Community Blueprint,
<http://www.aseansec.org/21083.pdf>, (diakses tanggal 15 Mei 2015).
- Diakses dari.<http://www.bataviase.co.id>. Penyelundupan Pakaian Bekas Marak. Opini Republika. Pada tanggal 15 Maret 2010
- <http://www.republika.com>.Awal mula perdagangan pakaian bekas.htm, diakses pada tanggal 9 mei 2011
- <http://thenationonlineng.net/web3/saturday-magazine/special-report/7765.html>, diakses pada tanggal 25 agustus 2010.
- <http://thenationonlineng.net/web3/saturday-magazine/special-report/7765.html>, diakses pada tanggal 25 agustus 2010.
- <http://www.hupelita.com/baca.php?id=12028>, diakses pada tanggal 04 Oktober 2010.
- Integrasi Ekonomi ASEAN 2015, <https://www.academia.edu/9503310/>(diakses tanggal 25 Juli 2015)
- Kadin-Indonesia. "Waspada Daya Saing Nasional". Hal.21-22. Diakses dari www.kadin-indonesia.or.id. pada tanggal 01 Maret pukul 17.18 WIB